S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/PERMENTAN/RC.110/9/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/PERMENTAN/RC.110/12/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka mempercepat pencapaian swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, perlu dilakukan perubahan kegiatan dan anggaran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/PERMENTAN/RC.110/12/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

1. BAB III Huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 6, Huruf B angka 1 sampai dengan angka 4 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, Huruf C angka 1 diubah, Huruf D ditambah angka 5, Huruf F angka 1 dan angka 2 diubah, Huruf G angka 2 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. format 2 nomor 1 diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. format 3 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/PERMENTAN/RC.110/9/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62/PERMENTAN/ RC.110/12/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan/atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
   Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi dan jagung. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan budidaya padi dan fasilitas penerapan budidaya jagung.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
   Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi kedelai dan komoditas aneka kacang dan umbi lainnya. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan budidaya kedelai dan fasilitas penerapan budidaya aneka kacang dan umbi lainnya.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.

   Kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan produsen benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penyediaan benih bersertifikat.

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI.

   Kegiatan ini untuk memperkuat perlindungan tanaman pangan dalam rangka mengamankan pertanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam kegiatan ini adalah kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan iklim (PPDPI) dan Sarana Pengendalian OPT. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari susut hasil dan meningkatkan daya saing. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan fasilitas Penerapan Standardisasi Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

   Bantuan Pemerintah yang diberikan melalui pemberian penghargaan untuk kelompok tani berprestasi bidang tanaman pangan.

B. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.

Kegiatannya meliputi:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

   Kegiatan ini untuk meningkatkan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pengembangan kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, kawasan sayuran lainnya, kawasan tanaman obat, dan sarana prasarana budidaya sayuran dan tanaman obat.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

   Kegiatan ini untuk meningkatkan produksi buah dan florikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pengembangan kawasan jeruk dan pemeliharaan jeruk, pengembangan kawasan buah lainnya, pengembangan kawasan tanaman florikultura dan sarana prasarana budidaya tanaman buah.

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

   Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa sarana prasarana pascapanen, bangsal pascapanen, sarana prasarana pengolahan.

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.

   Kegiatan ini untuk meningkatkan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa produksi/penyediaan benih bawang merah, benih jeruk, benih buah lainnya, benih sayuran lainnya, dan pembinaan lembaga pembenihan hortikultura.

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura.

   Kegiatan ini untuk meningkatkan sistem perlindungan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan untuk pengendalian OPT Hortikultura.

C. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

   Kegiatan ini untuk mengembangkan tanaman tahunan dan tanaman penyegar. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pengembangan tanaman tahunan, kakao, penyegar lainnya, dan perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering.

D. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Kegiatannya meliputi:

5. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
   Kegiatan ini untuk meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa penguatan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

F. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian serta Pendidikan Pertanian.

Kegiatannya meliputi:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

   Kegiatan ini untuk memantapkan sistem penyuluhan pertanian. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan petani, layanan internal organisasi dan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan pertanian.

2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

   Kegiatan ini untuk memantapkan sistem pelatihan pertanian. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa layanan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian.

G. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Kegiatannya meliputi:

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
   Kegiatan ini untuk memantapkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pemberdayaan pekarangan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberian penghargaan mendukung pemenuhan pangan melalui pemanfaatan pekarangan.
4. Dihapus.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format 2

KEGIATAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

NO.	ESELON-1		KEGIATAN YANG DITETAPKAN
1.	Ditjen Tanaman Pangan	1	Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus
		2	Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton
			a. Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Non Kalbar
			b. Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Kalbar
		3	Bantuan Budidaya Padi Salibu
		4	Bantuan Budidaya Mina Padi
		5	Bantuan Budidaya Pengembangan Desa Pertanian Organik untuk Padi
		6	Bantuan Budidaya Padi Jarwo Super
		7	Peningkatan Produksi Padi melalui Pengembangan Varietas Unggul Baru
		8	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		9	Bantuan Budidaya Padi Inbrida Rawa Lebak
		10	Bantuan Pengembangan Padi Organik Wilayah Perbatasan
		11	Bantuan Budidaya Jagung PATB:
			a. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1
			b. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2
			c. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Litbang/Nasional
			d. Bantuan Budidaya Jagung Komposit

		12	Bantuan Budidaya Jagung PLTJ:
			a. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1
			b. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2
			c. Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Litbang/Nasioanl
			d. Bantuan Budidaya Jagung Komposit
		13	Peningkatan Produksi Kedelai
		14	Peningkatan Produksi Kedelai melalui APBN-P 2017
		15	Peningkatan Produksi Kedelai melalui Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA)
		16	Pengembangan Budidaya Ganyong
		17	Pelaksanaan Dukungan Kawasan Perbatasan (Budidaya Ubikayu)
		18	Bantuan Biaya Sertifikasi
		19	Pemasangan Instalasi Listrik (Mendukung *Vertical Dryer* Padi 10 ton SP3T)
		20	Sertifikasi Organik
		21	Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik)
		22	Bantuan Penanggulangan OPT WBC

Format 3

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan/Lahan Kering	Ha	258	33 Prov/ 388 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus	Ha	2.615	1 Prov/ 3 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Hibrida	Ha	1.125	21 Prov/ 83 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Non Kalbar	Ha	3.342	19 Prov/ 78 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Kalbar	Ha	4.420	1 Prov/ 12 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Salibu	Ha	2.600	7 Prov/ 28 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Mina Padi	Ha	5.103	6 Prov
				Desa Organik Padi	Bantuan Budidaya Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk Padi	Ha	2.493	31 Prov/ 162 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Jarwo Super	Ha	1.517	10 Prov (Pengadaan Pusat)
				Gapoktan/Poktan	Peningkatan Produksi Padi melalui Pengembangan Varietas Unggul Baru	Ha	5.670	2 Prov (Pengadaan Pusat)
				Gapoktan/Poktan	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Unit	175.000	33 Prov/ 276 Kab

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Budidaya Padi Inbrida Rawa Lebak		Ha	1.653	1 Prov/ 1 Kab
				Gapoktan/Poktan	Bantuan Pengembangan Padi Organik Wilayah Perbatasan		Ha	2.493	2 Prov/ 2 Kab
			2. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	Gapoktan/Poktan /LMDH/Koperasi /Profesi/ Perorangan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Jagung PATB	Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1	Ha	885	29 Prov
						Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2	Ha	870	27 Prov
						Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Litbang/Nasional	Ha	750	26 Prov
						Bantuan Budidaya Jagung Komposit	Ha	393	7 Prov
				Gapoktan/Poktan / LMDH/ Koperasi/Profesi/ Perorangan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Jagung PLTJ	Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1	Ha	795	11 Prov
						Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2	Ha	780	16 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
						Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Litbang/Nasional	Ha	660	20 Prov
						Bantuan Budidaya Jagung Komposit	Ha	303	13 Prov
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	Petani/Kelompok Tani	Peningkatan Produksi Kedelai		Ha	1.386	22 Prov/ 147 Kab
				Petani/Kelompok Tani	Peningkatan Produksi Kedelai melalui Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA)		Ha	2.974	7 Prov/ 12 Kab
				Petani / Kelompok Tani	Peningkatan Produksi Kedelai melalui APBN-P 2017		Ha	1.261	20 Prov/ 199 Kab
			2. Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Petani/Kelompok Tani	Pengembangan Budidaya Ganyong		Ha	3.000	1 Prov/ 1 Kab
				Petani/Kelompok Tani	Pelaksanaan Dukungan Kawasan Perbatasan (Budidaya Ubi Kayu)		Ha	3.844	1 Prov/ 2 Kab/ Kota
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih	Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat	Kelompok Tani/Kelompok Penangkar atau Gabungan Kelompok Tani	Penguatan Desa Madiri Benih				
					-	Bantuan Benih Sumber	Kg	15	
					-	Bantuan Biaya Sertifikasi	Ha	35	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
		Tanaman Pangan		dengan Kelompok Penangkar	Pengembangan Desa Mandiri Benih			
					- Biaya Sarana Produksi dan Lainnya	Ha	37.000	31 Prov
					- Sarana Peralatan Mesin Pengolahan dan Pengemasan Benih	Unit	40.000	
					- Gudang Penyimpanan Benih	Unit	80.000	
					- Lantai Jemur	Unit	45.000	
				Petani/Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Benih Padi Inbrida (Pusat)	Kg	10,3	30 Prov
			Dokumen Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Dihapus)					
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman	Petani/Poktan/ Gapoktan yang Wilayahnya Berpotensi	Bahan dan/atau Alat Pendukung PPHT Padi	Ha	19.000	31 Prov
					Bantuan Penaggulangan OPT WBC	Paket	200.000	5 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
		Gangguan OPT dan DPI	Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Terkena Serangan OPT	Bahan dan/atau Alat Pendukung PPHT Jagung	Ha	11.100	19 Prov
					Bahan dan/atau Alat Pendukung PPHT Kedelai	Ha	7.400	13 Prov
				Petani/Poktan/ Gapoktan yang Wilayahnya di Rawan DPI (Banjir/ Kekeringan)	Bahan dan/atau Alat Pendukung PPDPI Padi (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air)	Ha	10.225	13 Prov
					Bahan dan/atau Alat Pendukung PPDPI Padi (Pembuatan Biopori)	Ha	15.550	2 Prov
				Petani/Poktan/ Gapoktan/BPTPH /Dinas Pertanian Provinsi	Bantuan Sarana Pestisida/Herbisida	Paket	83.000.000	33 Prov
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Combine Harvester* Kecil (Pusat dan Daerah)	Unit	124.400	16 Prov/ 130 Kab
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Combine Harvester* Sedang (Pusat dan Daerah)	Unit	151.171	28 Prov/ 124 Kab
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Combine Harvester* Besar (Pusat dan Daerah)	Unit	406.171	28 Prov/ 196 Kab
				Poktan/Gapoktan	*Vertikal Dryer* Padi + Bangunan Kap 6 Ton/Proses	Paket	770.000	2 Prov/ 5 Kab
				Poktan/Gapoktan	*Vertikal Dryer* Padi + Bangunan Kap 10 Ton/Proses	Paket	917.334	2 Prov/ 3 Kab
				Poktan/Gapoktan	*Vertikal Dryer* Jagung + Bangunan Kap 10 Ton/Proses	Paket	887.592	1 Prov/ 2 Kab

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Gapoktan	RMU Beras Organik	Paket	1.800.000	1 Prov/ 1 Kab
				Poktan/Gapoktan	RMU + *Packing* Daerah Perbatasan	Paket	580.000	11 Prov/ 15 Kab
				Poktan/Gapoktan	Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras Bermutu (*Grading* dan *Packing*)	Paket	300.000	6 Prov
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Corn Combine Harvester* (Pusat dan Daerah)	Unit	330.000	16 Prov
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Corn Sheller* (Pusat dan Daerah)	Unit	27.200	23 Prov/ 175 Kab
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Power Thresher* Multiguna (Pusat dan Daerah)	Unit	25.540	15 Prov/ 73 Kab
				Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Lembaga Lainnya	*Power Thresher* (Pusat dan Daerah)	Unit	22.500	17 Prov
				Pemda	*Moisture Tester*	Unit	7.000	5 Prov
				Poktan/Gapoktan	Fasilitasi Sarana Pascapanen Untuk Mendukung SP3T yang terdiri dari (*Vertical Dryer* Padi Kap. 10 ton, Rmu + *Packing*, Bangunan, *Combine Harvester* Besar, *Combine Harvester* kecil, Pemasangan Instalasi Listrik)	Paket	2.182.069	8 Prov/ 10 Kab
				Poktan/Gapoktan	*Vertikal Dryer* Padi + Bangunan Kap 30 Ton/Proses	Paket	2.815.543	1Prov/ 2 Kab

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Poktan/Gapoktan	Sarana Angkut Roda 3	Unit	35.000	1 Prov/ 3 Kab
			Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan	Sertifikasi Organik	Paket	30.000	17 Prov
				Poktan/Gapoktan	Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik)	Paket	30.000	6 Prov
		6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan	Paket	84.000	3 Poktan
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah (APBN)	Ha	40.052	29 Prov dan 134 Kab/ Kota
					Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah (APBN-P)	Ha	40.000	6 Prov dan 12 Kab/Kota
			2. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Cabai (APBN)	Ha	29.922	33 Prov dan 263 Kab/ Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Cabai (APBN-P)	Ha	30.000	10 Prov dan 32 Kab/ Kota
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya			
					- Bawang Putih (APBN)	Ha	40.000	5 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Bawang Putih (APBN-P)	Ha	20.000	5 Prov dan 8 Kab/Kota
					- Kentang (APBN-P)	Ha	17.000	6 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Pete (APBN-P)	Ha	7.500	5 Prov dan 17 Kab/Kota
					- Jengkol (APBN-P)	Ha	7.500	5 Prov dan 17 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Sayuran Dataran Tinggi (APBN-P)	Ha	10.125	1 Prov dan 1 Kab/Kota
					- Sayuran Lainnya (APBN-P)	Ha	10.000	2 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Jagung Manis (APBN-P)	Ha	10.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Tanaman Obat (APBN-P) - Lidah Buaya	Ha	20.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
			5. Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat (APBN-P) *a. Cultivator*	Unit	25.000	Pusat
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah	a. Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Jeruk (APBN)	Ha	15.000	24 Prov dan 41 Kab/ Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	b. Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Jeruk (APBN-P)	Ha	10.000	7 Prov dan 11 Kab/Kota
					c. Fasilitasi Pemeliharaan Jeruk (APBN)	Ha	8.000	24 Prov dan 41 Kab/ Kota
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah Lainnya (APBN-P)			
					- Mangga	Ha	6.000	3 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Manggis	Ha	6.000	5 Prov dan 8 Kab/Kota
					- Durian	Ha	6.000	4 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Salak	Ha	20.000	5 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Pisang	Ha	12.650	4 Prov dan 5 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Pepaya	Ha	10.000	3 Prov dan 4 Kab/Kota
					- Sukun	Ha	6.000	1 Prov dan 3 Kab/Kota
					- Duku	Ha	6.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
					- Lengkeng	Ha	10.000	2 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Belimbing	Ha	6.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
					- Nenas	Ha	21.000	2 Prov dan 3 Kab/Kota
					- Srikaya	Ha	10.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
			3. Kawasan Tanaman Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (APBN)	M2	155,67	4 Prov dan 4 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			4. Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah (APBN-P) - Pompa Air 3" - Ekatalog	Unit	8.500	Pusat
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Prasarana dan Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pascapanen (APBN-P) - Angkutan motor roda 3 - Timbangan - Terpal	 Unit Unit Unit	 30.000 1.050 7.580	 Pusat Pusat Pusat
			2. Bangsal Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitas Bantuan Sarana Bangsal Pascapanen (APBN-P) - Gudang Benih Bawang Merah	Unit	200.000	1 Prov dan (2 Kab/ Kota)
			3. Sarana Prasarana Pengolahan	Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang Telah	Fasilitasi bantuan Sarana Prasarana Pengolahan (APBN-P)			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	- Cabai	Unit	90.000	16 Prov dan 38 Kab/Kota
					- Bawang Merah	Unit	90.000	10 Prov dan 16 Kab/Kota
					- Pisang	Unit	90.000	2 Prov dan 2 Kab/Kota
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Produksi/ Penyediaan Benih Sayuran Lainnya	Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau balai benih hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Produksi/Penyediaan Benih Sayuran Lainnya (APBN-P)			
					- Bawang Putih	Kg	60	5 Prov dan 8 Kab/Kota
					- Kentang	Kg	30	6 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Petai	Batang	15	5 Prov dan 17 Kab/Kota
					- Jengkol	Batang	15	5 Prov,17 Kab/Kota
					- Sayuran Dataran Tinggi	Kg	15.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Sayuran Lainnya	Kg	15.000	2 Prov dan 6 Kab/Kota
			2. Produksi/ Penyediaan Benih Bawang Merah	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai benih hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Produksi/Penyediaan Benih Bawang Merah	Kg	7 s.d. 12	29 Prov dan 11 Kab/Kota
			3. Produksi/ Penyediaan Benih Jeruk	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai benih hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Produksi/Penyediaan Benih Jeruk (APBN-P)	Batang	20	7 Prov dan 11 Kab/Kota
			4. Produksi/ Penyediaan Benih Buah Lainnya	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai benih hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Produksi/Penyediaan Benih Buah Lainnya (APBN-P) - Mangga	Batang	26	3 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Manggis	Batang	33	5 Prov dan 8 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Durian	Batang	23	4 Prov dan 7 Kab/Kota
					- Salak	Batang	15	5 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Pisang	Batang	15	4 Prov dan 5 Kab/Kota
					- Pepaya	Gram	30	3 Prov dan 4 Kab/Kota
					- Sukun	Batang	50	1 Prov dan 3 Kab/Kota
					- Duku	Batang	15	1 Prov dan 1 Kab/Kota
					- Lengkeng	Batang	80	2 Prov dan 6 Kab/Kota
					- Belimbing	Batang	15	1 Prov dan 1 Kab/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Srikaya	Batang	35	1 Prov dan 1 Kab/Kota
			5. Pembinaan Lembaga Pembenihan Hortikultura	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai benih hortikultura yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Pembinaan Lembaga Perbenihan Hortikultura (APBN-P)			
					- *Knapsack sprayer/ handsprayer* pengendalian OPT	Unit	600	Pusat
					- Sarana Prasana (Irigasi *Sprinkle*)	Unit	80.000	1 Prov dan 1 Kab/Kota
					- Traktor Roda 4	Unit	306.800	3 Prov dan 3 Kab/Kota
					- Fasilitasi Benih Bawang Merah	Kali	200.000	Pusat
					- Fasilitasi Benih Cabai	Kali	200.000	Pusat
					- Fasilitasi Benih Hortikultura	Kali	200.000	Pusat
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura	Kelompok tani, Gapoktan dan/atau balai proteksi perlindungan hortikultura yang telah	Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura (APBN-P)			
					- Bawang Putih	Ha	3.120 s.d. 3.500	5 Prov
					- Kentang	Ha	2.580 s.d. 3.750	6 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	- Jeruk	Ha	1.822 s.d. 2.500	7 Prov
					- Mangga	Ha	1.700 s.d. 2.500	3 Prov
					- Durian	Ha	2.200 s.d. 2.250	4 Prov
					- Pisang	Ha	2.850 s.d. 3.000	4 Prov
					- Pepaya	Ha	2.900 s.d. 3.000	3 Prov
					- Bawang Merah	Ha	2.500 s.d. 3.200	6 Prov
					- Cabai	Ha	2.850 s.d. 3.200	10 Prov
					- Sayuran Lainnya	Ha	2.510 s.d. 3.000	2 Prov
					- Sayuran Dataran Tinggi	Ha	2.500	1 Prov
					- Jagung Manis	Ha	2.500	1 Prov
					- Lidah Buaya	Ha	2.510 s.d. 3.000	1 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
3.	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Pengembangan Tanaman Tahunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan	Ha	8.369	31 Prov (130 Kab/Kota)
			2. Pengembangan Tanaman Kakao	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	11.476	9 Prov (29 Kab/ Kota)
			3. Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya	Ha	5.076	16 Provinsi (47 Kab/ Kota)
			4. Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Perluasan Tanaman Tahunan dan penyegar di lahan Kering	Ha	7.738	11 Provinsi (22 Kab/ Kota)
		2. Pengembangan Tanaman	1. Pengembangan Tanaman Semusim	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya	Ha	3.950	12 Provinsi (29 Kab/ Kota)

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
		Semusim dan Rempah	Lainnya	Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL				
			2. Pengembangan Tanaman Rempah	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Rempah	Ha	4.361	21 Provinsi (74 Kab/ Kota)
			3. Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	Ha	4.657	15 Provinsi (54 Kab/ Kota)
			4. Pengembangan Tanaman Tebu	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	20.149	9 Provinsi (21 Kab/ Kota)
		3. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	965.038	6 Provinsi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			Kebakaran Lahan/ Kebun					
			2. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	45.160	23 Provinsi
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	108.177	26 Prov (106 kab/ Kota)
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	261.610	25 Prov (69 Kab/ Kota)
		5. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang Telah Diidentifikasi dan Ditetapkan sebagai CPCL	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	33.208	20 Prov (37 Kab/ Kota)

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
4.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas	Masyarakat	- Penanaman Benih HPT	Stek	10.000	33 Prov
			2. Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi	Masyarakat	- Pakan Konsentrat	Ton	6.000-8.500	17 Prov
		2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1. Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Pengembangan Sapi Potong	Kelompok di Kawasan Pengembangan Sapi potong	- Bangunan Kandang dan Gudang Pakan - Alsintan Pengolahan dan Pengawetan Pakan - Obat-obatan	Paket	1.500.000	1 Kab, 2 Prov
			2. Pengembangan Populasi Sapi Potong	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Sapi Potong	Paket	295.000	33 Prov
			3. Pengembangan Populasi Sapi Perah	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Sapi Perah	Paket	815.000	4 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			4. Pengembangan Populasi Kerbau	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kerbau	Paket	295.000	5 Prov
			5. Pengembangan Populasi Kambing	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kambing	Paket	215.000	1 Prov
			6. Pengembangan Populasi Domba	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Domba	Paket	215.000	2 Prov
			7. Pengembangan Populasi Itik	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Itik	Paket	31.000	9 Prov
			8. Pengembangan Populasi Ayam Lokal	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Ayam Lokal	Paket	31.000	8 Prov
			9. Pengembangan Populasi Babi	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Babi	Paket	140.000	6 Prov
			10. Pengembangan Populasi Kelinci	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kelinci	Paket	35.000	5 Prov
			11. Optimalisasi Reproduksi	Pemda	- Kontainer Depo Semen Beku	Unit	20.000	33 Prov
					- Kontainer Depo N2 Cair	Unit	20.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Kontainer atau Termos Lapangan	Unit	3.000	
			12. Pendampingan Upsus SIWAB	Petugas Inseminator	- Penghargaan/Insentif Petugas Inseminator TK. Provinsi	Paket	50.000	34 Prov
					- Penghargaan/Insentif Petugas Inseminator TK. Nasional	Paket	25.000	Pusat
		3. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1. Fasilitasi Bangunan RPH	Pemda	Bangunan RPH	Unit	1.000.000 - 9.000.000	1 Prov, 2 Kab/Kota
			2. Penataan Pemotongan Hewan Kurban	Masyarakat	- Tempat Pemotongan Hewan Kurban - Peralatan Pemotongan Hewan Kurban - Kandang Penampungan - *Unloading Portable*	Unit	350.000	1 Prov
			3. Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif	Pemda dan Masyarakat	- Sosialisasi Pencegahan Pemotongan Betina Produktif - Bimtek Pengawasan Kesmavet - Pengawasan Hulu - Bimtek AMPM dan *Sterility Control* - Pelaporan Data Pengembangan Pengendalian PBRBP - Pengawasan Hilir - Evaluasi Pengendalian TRBBP	Laporan	100.000 - 500.000	18 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Tim Terpadu Pencegahan Pemotongan Betina Produktif			
		4. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan	Masyarakat	- Rehab Bangunan - Peralatan Unit Usaha	Paket	150.000	3 Prov
			2. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Kelompok Ternak	- Peralatan Pengolahan Limbah Ternak	Paket	250.000	1 Prov
			3. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak	Pemda	- Peralatan Pasar - Sarana Kelembagaan Pasar	Paket	550.000	1 Prov
			4. Penguatan Kelembagaan Peternak	Petugas	Penghargaan Petugas Lapangan Berprestasi	Paket	20.000 – 40.000	Pusat
			5. Koordinasi/ Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Peternak	Penghargaan Kontes Ternak	Paket	7.500 – 16.000	1 Prov

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			6. Penguatan Kelembagaan peternak	Peternak/Kelompok Peternak	Penghargaan Kontes Ternak/ Anugerah Bhakti Peternakan (ABP)	Paket	7.500 - 25.000	Pusat
		5. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Masyarakat dan Dinas	1. Pembelian Obat-obatan dan Vaksin 2. Pembelian Peralatan Habis Pakai 3. Operasional Lapangan	Dosis	25.000	34 Prov, 1 Pusat dan 10 UPT
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi			29 Provinsi 193 Kab/Kota
					-Wilayah Jawa dan Bali	Ha	1.000 s.d. 1.100	
					-Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	1.100 s.d. 1.250	
					-Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	1.250 s.d. 1.500	
					Wilayah Papua dan Papua Barat	Ha	1.500 s.d. 1.800	
			2. Irigasi Air Permukaan	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan	Unit	80.000	208 Kab/Kota, 33 Provinsi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Konservasi Air dan Anomali Iklim	Kelompok Tani	Pengembangan Embung/ Dam Parit/*Long Storage*	Unit	100.000	141 Kab/Kota, 22 Provinsi
			4 Irigasi Rawa	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Rawa	Ha	4.000	10 Kab/Kota, 5 Provinsi
			5 Pengembangan Sumber-sumber air mendukung Peningkatan IP dan Produktivitas	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket	50.000 s.d. 200.000	33 Provinsi 1 Pusat
		2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Perluasan Sawah	Kelompok Tani	Perluasan Sawah -Wilayah : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha	16.000	140 Kab/Kota, 31 Provinsi
					-Wilayah : Maluku dan Papua	Ha	19.000	
			2. Optimasi Lahan Pertanian	Kelompok Tani	Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu	Ha	4.000	12 Kab/Kota, 8 Provinsi
				Kelompok Tani	Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah	Ha	1.500	161 Kab/Kota, 27 Provinsi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				Kelompok Tani	Penanganan Lahan Suboptimal	Ha	12.500	4 Kab/Kota, 1 Provinsi
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Traktor Roda 2	Unit	28.000	33 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Traktor Roda 4	Unit	450.000	30 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Pompa Air	Unit	25.000	33 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Rice Transplanter*	Unit	80.000	31 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Cultivator*	Unit	18.000	28 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Excavator*	Unit	800.000	32 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Handsprayer*	Unit	915	Pusat
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana	Pilot Percontohan Optimasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket	50.000 s.d. 200.000	33 Provinsi 1 Pusat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
		Pertanian	Pertanian					
		5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	1. Asuransi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	144	1 Pusat
			2. Asuransi Usaha Ternak	Kelompok Tani/ Kelompok Peternak	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi	Ekor	160	1 Pusat
7.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	BPP, Petani, Penyuluh Swadaya	Renovasi BPP Kota Jantho	Unit	240.000	Aceh
					Pembuatan Biogas di BPP	Unit	179.500	
					Sarana Pembelajaran	Unit	83.800	
			2. Layanan Internal Organisasi	Petani	Penghargaan untuk Petani	Org	20.000	Pusat
				Gabungan Kelompok Tani	Penghargaan untuk Gapoktan	Gapoktan	20.000	
				Kelembagaan Ekonomi Petani	Penghargaan untuk KEP	KEP	20.000	
				BPP	Penghargaan bagi BPP Terbaik	BPP	20.000	
				Penyuluh Pertanian	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian Teladan	Org	20.000	
			3. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Aceh	Pengadaan Laptop	Unit	8.000	Aceh
					Pengadaan Printer	Unit	2.950	Aceh
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok Replikasi READ	Bantuan Benih Unggul Bersertifikat Padi/Jagung (Label Ungu)	Kab	20.000	4 Kabupaten Replikasi
					Infrastruktur Mendukung Pertanian	Desa	50.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
								Program READ
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian	P4S	Pengembangan P4S Desa Mapesangka	Unit	200.000	Desa Mapesangka
8.	Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1. Mahasiswa STPP Dalam Rangka Karya Inovatif	- Penghargaan Pemenang I	Org	10.000	Pusat
					- Penghargaan Pemenang II	Org	8.000	
					- Penghargaan Pemenang III	Org	6.500	
					- Penghargaan Pemenang Harapan	Org	5.000	
				2. Tenaga Pendidikan	- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan I	Org	20.000	Pusat
					- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan II	Org	17.500	
					- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan III	Org	15.000	
				3. Tenaga Pendidik Dalam Rangka Karya Ilmiah	- Penghargaan bagi Pemenang ke I Karya Ilmiah Tenaga Pendidik	Org	20.000	Pusat
					- Penghargaan bagi Pemenang ke II Karya Ilmiah Tenaga Pendidik	Org	17.500	
					- Penghargaan bagi Pemenang ke III Karya Ilmiah Tenaga Pendidik	Org	15.000	
				4. Mahasiswa dan Siswa Non PNS	Beasiswa Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	15.000	Pusat
				5. Lembaga Pendidikan	Bantuan Operasional Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	35.000	Pusat
				6. Siswa	Bantuan Praktek Siswa	Siswa	560	Pusat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
				7. Siswa SMK-PP Dalam Karya Inovatif	- Pemberian Penghargaan Pemenang 1	Org	10.000	Pusat
					- Pemberian Penghargaan Pemenang 2	Org	8.000	
					- Pemberian Penghargaan Pemenang 3	Org	6.000	
					- Penghargaan Bagi Pemenang Harapan	Org	3.500	
9.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1. Kawasan Mandiri Pangan	Kelompok Afinitas	Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan (5 Desa)	100.000 (Tahap Pengembangan)	12 Provinsi, 78 Kab: 78 Kawasan
			2. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Kelompok Masyarakat	Pemantapan Ketersediaan Pangan	Kelompok	100.000	Pusat: 2 Kelompok
			3. Pemberdayaan Petani Kecil (SOLID)	Kelompok Mandiri	*Matching Fund* Kepada Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri (KM)	9.000	2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara, 11 Kabupaten: 224 Desa)
			4. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Produktif Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri	Pembangunan Prasarana/ Infrastruktur KM	Kelompok Mandiri (KM)	20.000	2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara, 11 Kabupaten: 224 Desa)

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
			Skala Kecil (SOLID)					
		2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pemberdayaan Perkarangan Pangan	Kelompok Wanita	Pemberdayaan Perkarangan Pangan	Desa/ Kelompok	15.000 (Tahap Penumbuhan)	32 Provinsi 315 Kabupaten/ Kota
			2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Perkarangan	Lokasi	130.000 (Sasaran Baru Kegiatan) 50.000 (Lanjutan)	3 Lokasi
			3. Penghargaan Mendukung Pemenuhan Pangan melalui Pemanfaatan Perkarangan	Dasawisma/ Kelompok	Penghargaan Mendukung Pemanfaatan Perkarangan	Dasawisma/ Kelompok	18.750	Pusat: 12 Penerima
		3. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Gapoktan	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	50.000 (Tahap Pengembangan)	
			2. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Gapoktan	Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan	160.000 (Tahap Penumbuhan)	7 Provinsi
							60.000 (Tahap Pengembangan)	31 Provinsi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp. 000)	KET
							15.000 (Toko Tani Indonesia)	DKI Jakarta dan Botabek
		4. (Dihapus)						

G. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Kegiatannya meliputi:

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
   Kegiatan ini untuk memantapkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pemberdayaan pekarangan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberian penghargaan mendukung pemenuhan pangan melalui pemanfaatan pekarangan.
4. Dihapus.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN